

Nomor : B-328/II.9/RI.00.00/6/2025

Jakarta, 30 Juni 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : Tiga berkas

Hal : Penyampaian *Policy Paper* Kabupaten Pacitan
dan Kabupaten Trenggalek

Yth.

1. Bupati Pacitan

2. Bupati Trenggalek

di Tempat

Dalam rangka implementasi riset dan inovasi untuk pembangunan daerah, Direktorat Fasilitas dan Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah, Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, dalam Triwulan II telah melakukan pembinaan teknis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek, dengan luaran naskah kebijakan, "**Hilirisasi Komoditas Kelapa untuk Peningkatan PDRB Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek Sebagai Lokasi Prioritas Pemerataan Pembangunan di Jalur Lintas Selatan Jawa Timur**".

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hasil kajian dengan rekomendasi kebijakan 1) implementasi kebijakan hilirisasi berbasis riset dan inovasi dengan membangun kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset (termasuk BRIN), pelaku usaha, dan komunitas lokal dan memanfaatkan skema pendanaan BRIN seperti RIIM Kompetisi, PKR, dan RIIM Start-up BRIDA untuk menginkubasi inovasi di sektor hilirisasi kelapa, 2) penguatan SDM hulu-hilir melalui pengembangan program pelatihan terpadu untuk penyuluh dan pelaku hilirisasi berbasis vokasi dan praktik langsung dari industri serta mendorong masuknya program praktisi mengajar pada SMK/Sekolah Tinggi dengan fokus pada pengolahan hasil, pengemasan, mutu, dan pemasaran digital, 3) pengembangan kawasan industri kecil-menengah dengan memprioritaskan pembangunan kawasan IKM hilirisasi kelapa di dua kabupaten (dan kabupaten lainnya), 4) pemberian insentif hilirisasi mikro dengan menyiapkan regulasi daerah untuk insentif, dan 5) penguatan kelembagaan koperasi/BUMDes/Ma sebagai pelaku hilirisasi secara profesional untuk mengelola unit-unit pengolahan bersama, serta menyediakan pelatihan rutin dan sistem audit kelembagaan agar transparan dan akuntabel.

Kami mohon tanggapan secara tertulis untuk pemanfaatan rekomendasi *policy paper* ini. Apabila diperlukan diskusi teknis lebih lanjut, dapat menghubungi **Sdri. Rachmawati (No. HP. 0877-6064-6410)**.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah,



Dr. Yopi

Tembusan:

1. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
2. BRIDA Provinsi Jawa Timur;
3. BAPPERIDA Kabupaten Pacitan;
4. BAPPEDALITBANG Kabupaten Trenggalek.

HILIRISASI KOMODITAS KELAPA UNTUK PENINGKATAN PDRB KABUPATEN PACITAN DAN KABUPATEN TRENGGALEK SEBAGAI LOKASI PRIORITAS PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI JALUR LINTAS SELATAN JAWA TIMUR

Penanggung Jawab

Wiwiek Joelijani

Direktur Fasilitas dan Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah

Penulis Naskah

Rachmawati^{1*}, Wiwiek Joelijani¹, Argoposo C. Nugroho¹, Reyza Pratama¹, Dwi Risdianto¹, Budi Kaliwanto¹, Eka W. Sari¹, I Putu Wardana², Alqoma Subkhi³, Susi Minarsih⁴, Wiwik H. Winarsih⁵, Masluhin¹

¹ Direktorat Fasilitas dan Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah, BRIN

² Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan, BRIN

³ BAPPEDALITBANG Kabupaten Trenggalek

⁴ BAPPERIDA Kabupaten Pacitan

⁵ BRIDA Provinsi Jawa Timur

*Korespondensi: rach030@brin.go.id

Ringkasan Eksekutif

Pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) Jawa merupakan bagian dari strategi pemerataan ekonomi nasional dalam RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045. Di dalam dokumen rancangan akhir RPJMD Jawa Timur Tahun 2025–2029, disebutkan mengenai tindak lanjut pembangunan JLS untuk membuka konektivitas dan mengembangkan wilayah selatan. Dokumen tersebut juga menyebutkan bahwa salah satu lokasi prioritas untuk pemerataan pembangunan adalah Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek. Di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan 2021–2026 dan dokumen Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK) Pacitan 2024–2044, disebutkan bahwa salah satu komoditas yang potensial untuk dikembangkan adalah kelapa, dengan produksi 21 ribu ton per tahun, sedangkan Kabupaten Trenggalek juga memiliki produksi kelapa yang cukup signifikan sekitar 8 ribu ton per tahun. Prioritas pengembangan komoditas kelapa, masih memerlukan fokus perhatian pada peningkatan nilai tambah, karena kontribusi terhadap perekonomian daerah masih didominasi penjualan bahan mentah dan minimnya proses hilirisasi, sebagaimana disebutkan dalam dokumen Peta Jalan Hilirisasi Kelapa Tahun 2025–2045. Tujuan kajian kebijakan ini adalah mendorong kontribusi hilirisasi kelapa terhadap PDRB Kabupaten Pacitan dan Trenggalek melalui peningkatan nilai tambah kelapa. Tantangan utama yang dihadapi antara lain stagnasi produksi komoditas kelapa, keterbatasan SDM, dan lemahnya kelembagaan ekonomi lokal. Untuk itu, diperlukan kebijakan pengembangan yang bersifat inklusif, terintegrasi, dan berbasis potensi lokal. Kebijakan yang direkomendasikan dalam penguatan sistem hilirisasi kelapa di Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek antara lain implementasi riset dan inovasi hulu-hilir dengan melibatkan *multistakeholders*, pengembangan SDM, pengembangan kawasan industri kecil–menengah, pemberian insentif hilirisasi mikro, serta penguatan kelembagaan koperasi/BUMDes/Ma. Bagian akhir, disampaikan peran Brida-BRIN dalam memperkuat ekosistem riset dan inovasi mendukung hilirisasi kelapa di Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek. Seluruh kebijakan ini menjadi satu kesatuan dalam upaya membangun ekosistem hilirisasi kelapa yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berbasis komunitas.

Katakunci: hilirisasi, kelapa, Pacitan, Trenggalek, JLS

Pembangunan kewilayahan dalam rangka pemerataan ekonomi masih menjadi agenda besar nasional, dan saat ini termasuk ke dalam delapan agenda besar (Asta Cita) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Rencana pembangunan jangka menengah tersebut merupakan implementasi tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menuju Indonesia Emas 2045. Jalur Lintas Selatan (JLS) Jawa sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam agenda pemerataan ekonomi tersebut. JLS merupakan pembuka akses ekonomi wilayah selatan Jawa. Pembangunan JLS telah dimulai sejak tahun 2005 dengan sumber anggaran dari APBN, APBD, dan pinjaman dari JICA dan Islamic Development Bank (IsDB). JLS membentang dari Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, hingga Provinsi Jawa Timur sepanjang 1.405 km dan ditargetkan rampung pada tahun 2026.

Tabel 1. Profil Ekonomi Kawasan Selatan Jawa Timur yang Dilalui Jalur Lintas Selatan (JLS)

Kabupaten	Penduduk miskin 2024 (%)	Pertumbuhan ekonomi 2024 (%)	PDRB per kapita 2024 (ribu rp)
Prov. Jatim	9,56	4,93	75.770
Pacitan	13,08	4,34	35.096
Trenggalek	10,50	4,71	32.726
Tulungagung	6,28	4,86	46.009
Blitar	8,16	4,44	37.811
Malang	8,98	4,96	50.593
Lumajang	8,65	4,52	37.579
Jember	9,01	4,86	39.464
Banyuwangi	6,54	4,68	62.086

Pembangunan JLS Jawa Timur tersebut termasuk ke dalam RPJMD Jawa Timur Tahun 2009–2024 yang mencakup perencanaan pembangunan infrastruktur, sebagai upaya peningkatan konektivitas dan mendukung pengembangan pariwisata dan perekonomian di wilayah selatan provinsi.^[1] Selanjutnya di dalam rancangan akhir RPJMD 2025–2029 percepatan pembangunan JLS dan pemenuhan daya dukung pengembangan ekonomi di sekitarnya masih menjadi salah satu misi pembangunan yaitu Jatim Akses.^[2] Secara progresif pemerintah baru merampungkan 386,91 km dari target 628,39 km yang selesai di tahun 2026.

Salah satu fokus arah kebijakan RPJMN Tahun 2025–2045 adalah transformasi ekonomi pada proses hilirisasi sumber daya alam unggulan, dan peningkatan kapasitas riset dan inovasi, serta produktivitas tenaga kerja.^[3] Selaras dengan RPJPN, pemerintah provinsi Jawa Timur

mengimplementasikan agenda tersebut ke dalam antara lain misi Jatim Sejahtera, Jatim Kerja, dan Jatim Agro. Di dalam dokumen rancangan akhir RPJMD 2025–2029, salah satu lokasi prioritas untuk pemerataan pembangunan adalah kawasan afirmasi Pegunungan Sewu Jawa Timur yang meliputi Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek.^[2] Sebelumnya suatu studi menyebutkan bahwa pengembangan JLS akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap proporsi keuntungan industri jika difokuskan pada tiga kabupaten yaitu Pacitan, Trenggalek, dan Blitar.

Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek adalah kabupaten dengan profil ekonomi yang paling rendah di selatan Jawa Timur. Pada tahun 2024 proporsi penduduk miskin di Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek melampaui rata-rata tingkat kemiskinan di provinsi. Selain itu Kabupaten Pacitan tercatat memiliki pertumbuhan ekonomi terendah di antara kabupaten lintasan JLS dan bersama Kabupaten Trenggalek, menjadi *bottom two* pada nilai PDRB di kawasan selatan Jawa Timur (Tabel 1).^[4] Sementara itu berdasarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2024, daya saing Kabupaten Pacitan (3,56) dan Kabupaten Trenggalek (3,40) secara umum tergolong berdaya saing cukup namun masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur (3,88). Infrastruktur Kabupaten Trenggalek lebih baik daripada Kabupaten Pacitan, namun ekonomi makro Kabupaten Pacitan lebih stabil daripada Kabupaten Trenggalek. Kedua kabupaten sama-sama perlu memperkuat pilar pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dan kapabilitas inovasi (Gambar 1).^[5] Penguatan ketiga pilar tersebut sangat penting dalam mendukung hilirisasi sektor pertanian Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek.



Gambar 1. Profil IDSD 2024 Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek

Jawa Timur merupakan salah satu dari lima provinsi penghasil kelapa terbesar di Indonesia. Sayangnya, kontribusi sektor tersebut pada PDRB masih didominasi oleh aktivitas hulu yaitu produksi bahan mentah seperti kopra. Komoditas kelapa belum menjadi fokus utama dalam berbagai rencana pengembangan hilirisasi di wilayah selatan Jawa Timur. Akan tetapi, komoditas tersebut memiliki karakteristik strategis yang sangat potensial untuk dijadikan pengungkit pertumbuhan ekonomi lokal berbasis hilirisasi. Hal tersebut didukung oleh Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025–2045 sebagai bagian dari RPJPN.^[6] Di dalam rancangan akhir RPJMD Kabupaten Pacitan 2021–2026 industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi menjadi salah satu arah kebijakan pada misi mewujudkan transformasi ekonomi berbasis potensi lokal.^[7]

Sebelumnya, di dalam dokumen Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK) Pacitan 2024–2044, disebutkan bahwa salah satu komoditas yang potensial untuk dikembangkan adalah kelapa.^[8] Begitu pula Kabupaten Trenggalek yang sedang menyusun kedua dokumen tersebut.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat peluang besar untuk pengembangan hilirisasi yang mendorong peningkatan nilai tambah produk melalui proses pengolahan, pengemasan, *branding*, dan pemasaran berbasis inovasi. Dengan penguatan hilirisasi, bukan hanya kontribusi sektor primer terhadap PDRB yang meningkat, tetapi juga akan tercipta lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan masyarakat, dan terbangunnya industri kecil menengah berbasis potensi lokal.

LATAR BELAKANG

Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek memiliki produk unggulan atau produk prioritas yang sama yaitu komoditas **kelapa**. Komoditas tersebut seharusnya dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah serta berkontribusi signifikan dalam peningkatan PDRB dan kesejahteraan masyarakat. Kelapa merupakan produk multi-manfaat dari hulu hingga hilir. Beragam olahan kelapa bernilai tambah tinggi dan berada pada skala industri. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan sementara pasar produk olahan/turunan kelapa telah terbuka lebar baik di dalam maupun di luar negeri. Berikut ini adalah potensi, peluang dan tantangan, serta permasalahan dan hambatan yang dimiliki Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek dalam pengembangan hilirisasi komoditas kelapa.

POTENSI HILIRISASI KELAPA DI KABUPATEN PACITAN DAN TRENGGALEK

Jawa Timur tercatat memiliki perkebunan kelapa seluas 228.524 hektar dengan produksi mencapai 223.937 ton. Produktivitas kelapa Jawa Timur pernah mencapai produktivitas tertinggi se-Indonesia pada tahun 2022, yaitu mencapai 1,37 ton per hektar.^[6] Produksi kelapa di Kabupaten Pacitan, meskipun tidak setinggi Kabupaten Banyuwangi, namun terbilang tinggi dibandingkan kabupaten lainnya di selatan Jawa Timur (Gambar 3). Produksi dan luas tanam Kabupaten Pacitan tampak dua kali lebih tinggi daripada Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu lima tahun (2020–2024). Luas tanam kelapa di Kabupaten Pacitan mencapai 23 ribu hektar sedangkan Kabupaten Trenggalek hanya sekitar 9 ribu hektar. Dalam kurun waktu yang sama, produksi kelapa di Kabupaten Pacitan berkisar 21 ribu ton, sedangkan Kabupaten Trenggalek hanya sekitar 8 ribu ton (Gambar 4).

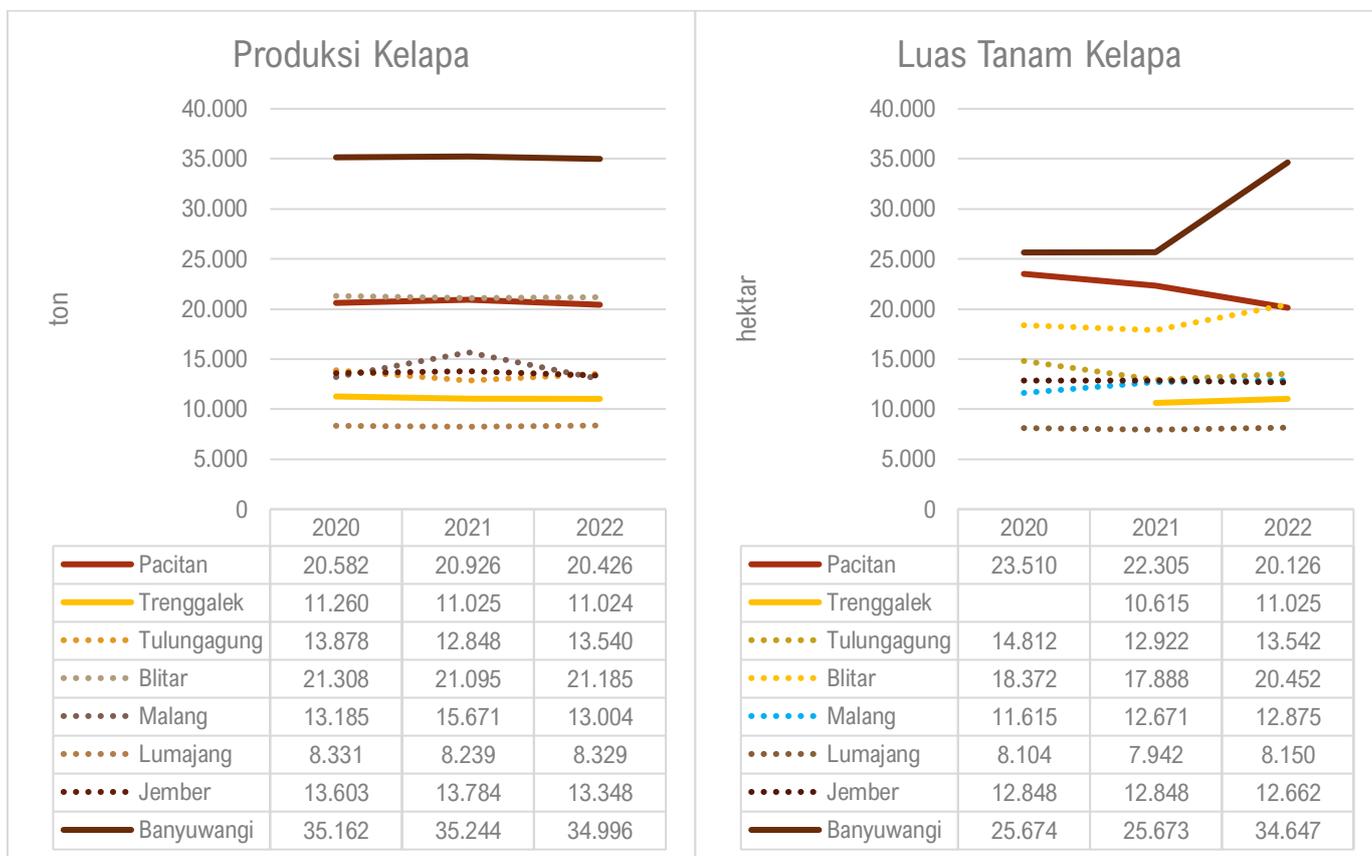
Dari aspek SDM, pengembangan hilirisasi kelapa tidak dapat dilepaskan dari peran pendidikan vokasi sebagai penyedia SDM lokal siap kerja, adaptif, dan inovatif. Hilirisasi kelapa memerlukan tenaga kerja dengan keterampilan teknis, manajerial, serta pemahaman

terhadap standar mutu, keamanan pangan, dan pemasaran. Sekolah menengah kejuruan memiliki peran penting dalam menyiapkan tenaga terampil di bidang budidaya, pengolahan hasil, hingga pemasaran. Sedangkan sekolah tinggi dapat memperkuat aspek terapan, inkubasi bisnis dan pembinaan UMKM hilir kelapa. Mahasiswa vokasi atau sarjana terapan dapat menjadi penggerak literasi teknologi dan kewirausahaan dari tingkat desa. Sebagian besar SMK Negeri di Kabupaten Pacitan dan Trenggalek telah memiliki jurusan terkait hilirisasi pertanian (Tabel 2), walaupun sekolah tinggi di kedua kabupaten tersebut sangat minim memiliki program studi atau jurusan spesifik agribisnis (Tabel 3).

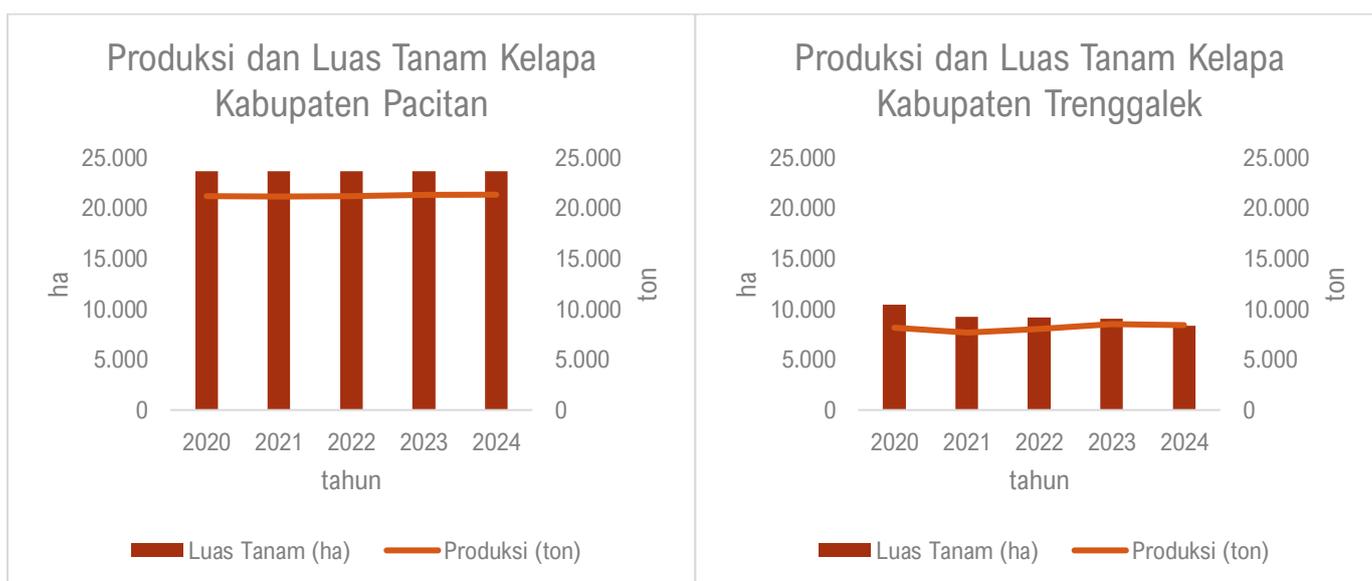
Dari aspek kelembagaan dan keuangan, dalam ekosistem hilirisasi peran koperasi, BUMDes/Ma dan UMKM sangat lah penting. Koperasi dapat menjembatani petani dengan proses hilirisasi. BUMDes/MA memiliki legitimasi desan dan fleksibilitas usaha, serta UMKM merupakan pelaku utama dalam pengolahan produk dan inovasi produk. Kabupaten Pacitan dan Trenggalek tercatat memiliki ratusan koperasi dan BUMDes/Ma, serta memiliki puluhan

ribu (Pacitan) hingga ratusan ribu (Trenggalek) UMKM (Tabel 4). Meskipun tidak secara spesifik dijelaskan mengenai produk atau jasa yang dihasilkan, namun jumlah kelembagaan tersebut merupakan sebuah potensi untuk dikembangkan menjadi IKM hilirisasi produk unggulan

daerah. Sementara itu untuk realisasi KUR Kabupaten Pacitan tercatat 195,4 T untuk 3,2 juta debitur pada Agustus 2024.^[9] sedangkan realisasi KUR Kabupaten Trenggalek hingga 21 April 2025 mencapai 76 T (25% dari target) untuk 1,3 juta debitur (38% dari target).



Gambar 3. Produksi Kelapa (Kiri) dan Luas Panen Kelapa (Kanan) di Kabupaten Bagian Selatan Jawa Timur Dalam Kurun Waktu Tiga Tahun (2020–2022). Sumber: BPS Jatim



Gambar 4. Produksi dan Luas Panen Kelapa Kabupaten Pacitan (Kiri) dan Kabupaten Trenggalek (Kanan) Tahun (2020–2024). Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Pacitan & Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek

Tabel 2. Daftar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Pacitan dan Trenggalek dengan Program Studi Terkait Hilirisasi Pertanian dan Perikanan

SEKOLAH KEJURUAN	Bisnis/Pemasaran Umum	Budidaya Pertanian/Perikanan	Agribisnis Pertanian/Perikanan	Teknologi Hasil Pertanian/Perikanan
PACITAN				
SMKN 3 PACITAN			✓	✓
SMKN 1 PACITAN				
SMKN 2 PACITAN	✓	✓	✓	✓
SMKN KEBONAGUNG			✓	✓
SMKN PRINGKUKU			✓	✓
SMKN BANDAR			✓	✓
SMKN NGADIROJO		✓	✓	
SMKN 2 NAWANGAN				
SMKN TULAKAN	✓			
SMKN 2 SUDIMORO				
SMKN 1 SUDIMORO				
SMKN 1 DONOROJO				
SMKN 2 DONOROJO			✓	✓
SMKN 1 NAWANGAN			✓	
TRENGGALEK				
SMKN 2 TRENGGALEK				
SMKN 1 PANGGUL			✓	✓
SMKN 1 POGALAN	✓			
SMKN 1 SURUH			✓	✓
SMKN 1 WATULIMO		✓	✓	✓
SMKN 1 TRENGGALEK			✓	✓

Sumber: <https://dapo.kemendikdasmen.go.id/>

Tabel 3. Daftar Sekolah Tinggi di Kabupaten Pacitan dan Trenggalek dengan Program Studi Terkait Hilirisasi Pertanian dan Perikanan

SEKOLAH TINGGI	EKONOMI SYARIAH	AGRIBISNIS
PACITAN		
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-FATTAH		
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI		
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA	✓	
INSTITUT STUDI ISLAM MUHAMMADIYAH	✓	
STKIP PGRI		
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MUHAMMADIYAH		
UNIVERSITAS TERBUKA		✓
TRENGGALEK		
STKIP PGRI		
AKADEMI KEPERAWATAN		
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS		
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MUHAMMADIYAH		
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH SUNAN GIRI	✓	
UNIVERSITAS TERBUKA		✓
POLITEKNIK KESEHATAN		

Sumber: <https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/>

Tabel 4. Jumlah Kelembagaan Terkait Hilirisasi Produk di Kabupaten Pacitan dan Trenggalek Tahun (2022-2024)

Kabupaten	Jumlah koperasi			Jumlah BUMD/Des/Ma			Jumlah UMKM		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pacitan	520	520	527	129	157	159	25.033	25.033	32.328
Trenggalek	420	417	419	152	152	152	143.975	143.975	143.975

Sumber: Dinas Koperasi dan UM Kab. Pacitan & Dinas Koperasi, UM dan Perdagangan Kab. Trenggalek

TANTANGAN DAN PELUANG HILIRISASI KELAPA

Secara umum kondisi hulu kelapa Indonesia menghadapi tantangan antara lain produktivitas kelapa cenderung menurun, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu dominasi pengusaha kelapa oleh perkebunan rakyat dengan lahan sempit, tingginya proporsi kelapa berumur tua, dan pola budidaya yang masih tradisional, selain itu konversi dan kerusakan lahan juga berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas kelapa. Pada bagian hilir, sebagian besar komoditas kelapa umumnya dijual oleh masyarakat dalam bentuk mentah tanpa pengolahan lebih lanjut. Ketergantungan pada perdagangan bahan mentah ini menyebabkan petani memperoleh margin keuntungan yang sangat rendah. Berdasarkan studi Prasetyia, komoditas pertanian yang tidak mengalami pengolahan hanya memberikan kontribusi ekonomi sekitar 15–25% dari nilai akhir produk setelah diproses dan dikemas.^[10] Hal tersebut menyebabkan PDRB sektor primer menjadi stagnan dari tahun ke tahun.

Menurut Bappenas sekitar 90% kelapa di Indonesia dipanen pada saat tua, dan sisanya dipanen saat muda. Hanya sekitar 4,4% kelapa tua yang diekspor tanpa diolah, 49% kelapa tua diproses menjadi kopra untuk berikutnya diproses menjadi minyak kelapa. Sekitar 82% minyak kelapa diekspor sebagai *crude coconut oil* (CNO) dan sisanya untuk bahan baku kosmetik dalam negeri. Selain menjadi kopra, kelapa tua juga diolah menjadi kelapa parut kering (7,9%), santan (7,1%), VCO (4,5%), dan lainnya (17,1%). Sedangkan kelapa muda hampir seluruhnya dikonsumsi di dalam negeri.

Sementara itu, bagian lain dari kelapa seperti air, sabut, dan tempurung belum dimanfaatkan secara optimal. Air kelapa yang tidak digunakan diperkirakan mencapai 3,68 juta ton, setara dengan potensi nilai ekonomi sebesar US\$5,25 miliar jika diekspor dalam bentuk air kelapa. Selain itu, potensi ekonomi dari sabut dan tempurung kelapa yang belum termanfaatkan juga signifikan, dengan nilai masing-masing mencapai US\$320 juta dan US\$373 juta. Pemanfaatan lebih lanjut dari bagian kelapa berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian melalui diversifikasi produk turunan.

Pengolahan kelapa masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut. Saat ini Indonesia sudah mampu mengolah kelapa menjadi VCO, nata de coco dari santan, *oleochemical* seperti *fatty acid*, *methyl esters*, dan *fatty alcohol*, serta *surfaktan* yang dimanfaatkan untuk sabun dan detergen yang diolah dari daging kelapa. Ada nata de coco dan minuman dari kelapa yang diolah dari air kelapa. Ada *coir twine*, *coir mat*, keset anyam, *cocomesh*, *coir log*, *coir blanket*, matras, jok kursi, serta *tawashi brushes* yang diolah dari sabut kelapa. Ada briket shisha, briket BBQ, karbon aktif, asap cair sebagai pengawet dan koagulan lateks, serta *graphene* yang diolah dari tempurung kelapa. Beberapa produk dari nira, batang, daun, bunga dan akar dengan nilai tambah lebih tinggi juga telah diproduksi di Indonesia, seperti gula kelapa, *coco aminos*, sirop kelapa, pakan ternak, pupuk tanaman, furnitur, kerajinan, bahan bangunan, dan lain-lain.

Sementara itu masih banyak produk turunan kelapa yang potensial untuk dikembangkan. Salah satu produk turunan dari daging kelapa yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah *medium chain triglyceride* (MCT). Prospek industri MCT semakin kuat terutama karena peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Santan pasta memiliki potensi untuk dikembangkan. Saat ini, Indonesia cenderung hanya mengekspor bahan mentah untuk pembuatan santan pasta, yang kemudian diolah lebih lanjut di negara lain seperti Singapura dan Malaysia. Dari air kelapa, BRIN telah melakukan penelitian yang menghasilkan *biocoating* dan *bioleather* dari *nata de coco*. Industri pengolahan sabut kelapa di Indonesia masih tertinggal dibandingkan Sri Lanka dan India. Kondisi ini menunjukkan bahwa hilirisasi produk kelapa di dalam negeri masih belum optimal. Pengembangan industri olahan kelapa akan memungkinkan peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, sekaligus memperkuat sektor ekspor.

Hasil kajian yang dilaksanakan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa potensi pemanfaatan kelapa dapat diarahkan untuk menghasilkan MCT, *nata de coco*, karbon aktif, dan tepung kelapa dengan nilai tambah masing-masing sebesar 30–40% dari bahan baku bagian kelapa (Tabel 5).

Indonesia memiliki sekitar 30 industri besar pengolahan kelapa yang tersebar terutama di daerah sentra perkebunan kelapa. Tiga dari 30 industri berada di Jawa Timur bagian utara yaitu PT Sari Mas Permai, PT Ikan Dorang dan PT Indo World. Di Kabupaten Pacitan terdapat PT Pacitan Surya Mandiri perusahaan perkebunan yang memproduksi berbagai olahan dari sabut kelapa antara lain *cocofiber*, *cocopeat*, dan *cocomesh* serta olahan dari tempurung kelapa berupa briket. Selain itu terdapat UMKM bernama Siyan Jaya Mandiri yang memproduksi gula kelapa dengan kualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan global. Kabupaten Pacitan telah menerbitkan Rencana Pembangunan Industri

Kabupaten (RPIK) yang salah satunya mencakup industri olahan kelapa, dan telah melakukan hilirisasi dengan memproduksi gula kelapa di Kecamatan Kebonagung, Tulakan, Ngadirojo, Arjosari, dan Donorojo. Produk kelapa tersebut telah ditetapkan sebagai produk unggulan daerah berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan.^[8] Produk tersebut telah dipasarkan antara lain ke Yogyakarta, Klaten, dan Surabaya. Sementara itu di Kabupaten baru menjual produk kelapa sebagai bahan baku ke luar wilayah antara lain Nganjuk. Sebagian kecil sabut kelapa diolah untuk jok.

Tabel 5. Nilai tambah produk turunan kelapa

Bagian kelapa	Produk olahan	Nilai tambah (%)
Daging	<i>medium chain triglyceride</i> (MCT)	38,32
	Tepung kelapa	43,63
Air	<i>Nata de coco</i>	31,92
Tempurung	Karbon aktif	39,63

PERMASALAHAN DAN HAMBATAN HILIRISASI KELAPA DI KABUPATEN PACITAN DAN TRENGGALEK

Wilayah selatan Jawa Timur dapat diusulkan untuk menjadi wilayah pengembangan berikutnya bagi industri olahan kelapa. Kabupaten Pacitan dan Trenggalek, berpeluang untuk memperkuat hilirisasi kelapa melalui pengembangan produk turunan berbasis kelapa. Meskipun potensi dan peluang hilirisasi kelapa sangat besar untuk mendukung perekonomian daerah, namun diketahui bahwa hilirisasi kelapa menghadapi permasalahan dan hambatan berikut:

KETERSEDIAAN BAHAN BAKU

Issue ketersediaan bahan baku hilirisasi kelapa dialamatkan kepada sektor hulu. Perluasan area tanam (ekstensifikasi) dan peningkatan produktivitas (intensifikasi) perlu menjadi fokus pengembangan. Sejumlah inovasi hasil penelitian dari pemerintah daerah lain dan balai penelitian sebenarnya telah menghasilkan varietas kelapa unggul baru^[6], namun tingkat adopsi di lapangan masih sangat rendah. Hal tersebut disebabkan inovasi pertanian di Indonesia masih lemah dalam aspek *scaling-up* dan *scaling-out* karena belum ada sistem kelembagaan yang menjembatani antara *knowledge production* dan *knowledge utilization*.

KETERBATASAN INFORMASI TEKNOLOGI & SDM

Keterbatasan akses dalam memperoleh informasi teknologi pengolahan dan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi tantangan. Banyak petani dan pelaku UMKM belum menguasai teknologi tepat guna untuk pengolahan hasil pertanian. Selain itu, rendahnya literasi digital dan kewirausahaan menjadi hambatan

dalam memasarkan produk olahan secara daring. Pendidikan vokasi di kedua kabupaten berkaitan dengan agribisnis sangat terbatas dan tidak berkesinambungan. Jurusan agribisnis hanya terdapat di sekolah menengah kejuruan (SMK) sementara sekolah tinggi di sana umumnya mengembangkan program studi pendidikan dan ekonomi syariah.

KETERBATASAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG HILIRISASI

Pascapanen dan pengolahan hasil membutuhkan infrastruktur pendukung yang memadai seperti rumah pengolahan hasil (RPH) dan rumah kemas. Namun di Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek, fasilitas ini sangat terbatas. Data Dinas Pertanian setempat menunjukkan hanya sebagian kecil kelompok tani yang memiliki akses ke alat pengolahan atau penyimpanan hasil panen. Kondisi ini menyebabkan kerugian pascapanen tinggi. Selain itu, minimnya investasi produktif di sektor pertanian membuat proses hilirisasi berjalan lambat.

PERNYATAAN KEBIJAKAN

TUJUAN

Kajian ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek melalui penguatan hilirisasi komoditas kelapa terkait dukungan infrastruktur JLS. Secara spesifik kebijakan ini bertujuan untuk:

1. Mengurangi ketergantungan terhadap komoditas mentah,
2. Meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan dan diversifikasi produk olahan kelapa,
3. Meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM/IKM, serta
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan selatan Jawa Timur.

PROFIL KEBIJAKAN YANG DIBAHAS

Kebijakan berfokus pada hilirisasi sebagai pendekatan utama untuk memaksimalkan nilai ekonomi dari komoditas/produk kelapa. Hilirisasi yang dimaksud mencakup ketersediaan bahan baku, penguatan SDM, dan penguatan sarana dan prasarana.

AKTOR KUNCI KEBIJAKAN

Kebijakan memerlukan peran serta keterlibatan para aktor, dan aktor utama pada lingkup wilayah kabupaten antara lain sebagai berikut.

Tabel 6. Aktor kunci kebijakan pengembangan hilirisasi kelapa

Aktor Kunci	Peran Strategis
Dinas Pertanian & Perkebunan	Pembinaan kelompok tani, pendampingan teknologi budidaya & pascapanen.
Dinas Perindustrian & Perdagangan	Penguatan rantai nilai, pengolahan dan pemasaran hasil, fasilitasi IKM.
Dinas Koperasi dan UMKM	Inkubasi usaha, akses pembiayaan, pelatihan wirausaha dan digitalisasi.
Bappeda & Brida	Integrasi program lintas sektor, pemetaan potensi, dan penguatan kelembagaan hilirisasi daerah.
Perguruan Tinggi & Mitra Riset	Transfer teknologi, pendidikan dan pelatihan inovasi, serta pilot project hilirisasi berbasis riset.

JUSTIFIKASI

Kebijakan hilirisasi komoditas kelapa di Kabupaten Pacitan dan Trenggalek diproyeksikan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditopang oleh beberapa faktor kunci yang saling mendukung dan memperkuat efektivitas implementasi kebijakan.

Pertama, potensi komoditas kelapa di kedua kabupaten telah terpetakan secara jelas dan didukung oleh dokumen perencanaan RPJMD dan RPIK yang secara eksplisit menempatkan kelapa sebagai salah satu komoditas unggulan strategis. Dukungan perencanaan ini menjadi landasan penting bagi sinkronisasi program lintas sektor, pengalokasian anggaran, serta penguatan sinergi antarpemangku kepentingan dalam mendorong hilirisasi kelapa secara berkelanjutan.

Kedua, pembangunan JLS sebagai proyek strategis nasional membuka peluang logistik yang sebelumnya tidak tersedia. JLS menghubungkan wilayah selatan Jawa Timur dengan Yogyakarta, Jawa Tengah, hingga ujung Banyuwangi, serta mempercepat konektivitas menuju pelabuhan-pelabuhan potensial seperti Pelabuhan Prigi dan Pelabuhan Pacitan. Jalur ini memperpendek waktu tempuh distribusi barang dan membuka akses pasar domestik yang lebih luas, bahkan membuka peluang ekspor langsung ke pasar internasional melalui pelabuhan selatan. Infrastruktur jalan yang representatif ini sangat mendukung terbentuknya rantai pasok terintegrasi dari hulu ke hilir.

Ketiga, permintaan pasar terhadap produk olahan kelapa terus mengalami peningkatan, baik di pasar lokal maupun nasional. Konsumen kini lebih menyukai produk bernilai tambah produk kelapa. Selain menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal, hilirisasi produk ini berpotensi meningkatkan nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan penjualan bahan mentah.

Keempat, kebijakan ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan koordinasi antarpemangku kepentingan. Selama ini, pengembangan sektor hulu dan hilir masih dilakukan secara sektoral dan tidak terintegrasi. Melalui pendekatan lintas dinas, yakni Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM, serta Bappeda/Brida, akan dibangun ekosistem hilirisasi terpadu yang fokus pada pengembangan kawasan

berbasis komoditas unggulan. Kolaborasi ini diperkuat dengan keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga riset, yang akan mendukung transfer teknologi dan inovasi berbasis kebutuhan riil pelaku usaha di lapangan.

Kelima, kebijakan ini memiliki kesesuaian dengan agenda strategis nasional, khususnya dalam konteks pemerataan pembangunan wilayah selatan Jawa Timur melalui proyek strategis nasional (PSN) dan Peta Jalan Hilirisasi Kelapa

2025–2045. Hilirisasi sektor ekonomi produktif merupakan instrumen utama untuk meningkatkan daya saing wilayah dan mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah. Dalam konteks ini, Kabupaten Pacitan dan Trenggalek sebagai bagian dari wilayah prioritas pembangunan di koridor selatan akan memperoleh momentum percepatan bila potensi sumber daya ekonominya dikelola dengan pendekatan nilai tambah yang berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Apabila permasalahan dan hambatan yang sebagaimana telah disebutkan di atas terus berlangsung tanpa mempertimbangkan peluang pengembangan, maka akan berisiko menyebabkan stagnasi ekonomi lokal, terutama jika pembangunan infrastruktur strategis seperti JLS tidak segera dikaitkan dengan pengembangan sektor produktif yang berorientasi pasar dan berkelanjutan. Kebijakan yang bersifat integratif dan inklusif diperlukan untuk menjembatani konektivitas fisik yang dibangun melalui JLS dengan penguatan kelembagaan ekonomi lokal, seperti koperasi dan BUMDes/Ma, serta UMKM pengolahan hasil kelapa. Tanpa pendekatan sistemik dan berbasis potensi lokal, pembangunan JLS dikhawatirkan hanya menjadi koridor lintasan, bukan katalisator transformasi ekonomi wilayah selatan Jawa Timur.

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN YANG DAPAT DIUSULKAN

1. Kebijakan riset dan inovasi hulu-hilir

Kebijakan ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menentukan fokus produk hilir dan memastikan rantai nilai komoditas berjalan secara berkelanjutan dari produksi hingga pemasaran. Pada bagian hulu, kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat riset terkait varietas unggul, teknik budidaya adaptif, teknologi pascapanen sederhana, serta pengelolaan lahan dan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga dapat menjaga ketersediaan dan kualitas bahan baku utama kelapa.

Jawa Timur merupakan salah satu lokasi proyek terkait peningkatan produksi dan penyebaran varietas unggul serta peningkatan produktivitas kelapa melalui penerapan *good agricultural practices* (GAP) dan tumpang sari.^[6] Petani di Kabupaten Pacitan umumnya menanam kelapa dari kelompok kelapa dalam. Untuk pengembangan, perkebunan kelapa yang diremajakan dapat berorientasi kepada industri yang disasar (Tabel 7). Hingga saat ini, Indonesia memiliki 60 varietas kelapa unggul baru. Beberapa contoh penerapan sistem tumpang sari antara lain kelapa-pisang-pepaya-terong-cabai-kelor dan kelapa-lamtoro-pisang-ubi kayu. Peran akademisi di sini tidak hanya sebagai penghasil riset, tetapi juga sebagai pendamping dalam implementasi inovasi di tingkat petani dan pelaku usaha hulu.

Tabel 7. Kelompok varietas unggul yang dapat ditransfer kepada petani untuk meningkatkan nilai tambah kelapa

Kelompok varietas	Karakter unggulan	Prospek pengolahan
Kelapa dalam	daging buah tebal dan banyak air	minyak kelapa, santan, kelapa parut kering, kopra, VCO, dsb.
Kelapa genjah	postur lebih pendek dan dapat berbuah dalam 3-4 tahun	gula kelapa (mudah dalam proses penyadapan nira)
Kelapa hibrida	produktivitas tinggi dan buah berkualitas baik	lebih beragam dari kelapa dalam

Sementara pada bagian hilir, kebijakan ini mendorong pembentukan ekosistem inovasi yang memungkinkan munculnya unit-unit produksi skala kecil-menengah melalui inkubasi bisnis. Inkubasi ini difokuskan pada penyediaan sarana transfer teknologi, pendampingan manajemen usaha, sertifikasi mutu, desain produk, hingga strategi pemasaran berbasis digital. Peran perguruan tinggi dan lembaga penelitian sangat penting dalam menyediakan inovasi teknologi yang aplikatif, sementara pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan regulator, dan pelaku usaha serta komunitas sebagai motor penggerak hilirisasi. Dengan pendekatan ini,

diharapkan terbentuk model bisnis hilirisasi yang adaptif, efisien, dan mampu menciptakan nilai tambah maksimal di tingkat lokal, sekaligus membuka peluang kerja baru dan memperkuat ekonomi daerah.

2. Kebijakan pengembangan SDM hulu-hilir

Pada tingkat hulu, penguatan difokuskan pada peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, agar mereka mampu menjadi agen perubahan yang tidak hanya memberikan pendampingan teknis budidaya, tetapi juga mengintegrasikan aspek teknologi, keberlanjutan lingkungan, serta orientasi pasar dalam setiap kegiatan penyuluhan. Tenaga terampil dari SMK dapat diberikan pelatihan lebih lanjut untuk dikader sebagai penyuluh. Karena penyuluh merupakan garda depan dalam memastikan penerapan inovasi di tingkat petani agar produksi berjalan lebih efisien, ramah lingkungan, dan konsisten kualitasnya sebagai bahan baku hilirisasi.

Sementara pada tingkat hilir, kebijakan ini menekankan pentingnya pengembangan SDM juga berbasis vokasi dan praktisi mengajar yang terhubung langsung dengan dunia usaha dan industri. Pelatihan dan pendidikan vokasi, mulai dari jenjang sekolah menengah (SMK) hingga pendidikan tinggi, diarahkan untuk mencetak tenaga terampil yang menguasai aspek pengolahan komoditas, teknik pengemasan modern, penerapan standar mutu dan keamanan pangan, digital marketing, hingga manajemen usaha kecil-menengah.

Mengingat minimnya pendidikan vokasi pada jenjang sekolah tinggi di Kabupaten Pacitan dan Trenggalek, maka kolaborasi dengan perguruan tinggi dari luar kabupaten dan dengan pelaku industri sebagai praktisi mengajar juga menjadi strategi penting untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan nyata industri hilirisasi. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya bertujuan mencetak SDM terampil, tetapi juga membangun ekosistem kompetensi lokal yang mampu mendorong hilirisasi produk daerah secara berkelanjutan dan berdaya saing.

3. Kebijakan penguatan sarana dan prasarana

a. Kebijakan pembangunan kawasan industri kecil-menengah hilirisasi kelapa, meliputi sarana produksi, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman.

Kebijakan pembangunan kawasan industri kecil-menengah (IKM) hilirisasi kelapa diarahkan untuk memperkuat rantai nilai komoditas unggulan daerah melalui penyediaan infrastruktur yang lengkap dan terintegrasi. Kawasan ini meliputi sarana produksi yang dilengkapi dengan alat dan teknologi tepat guna, fasilitas

pengemasan modern yang mendukung desain dan standar mutu produk, serta unit gudang untuk menjamin kualitas dan daya simpan produk. Selain itu, kawasan ini juga dilengkapi sarana pendukung pengiriman, seperti area logistik dan akses jalan yang terhubung langsung ke pasar lokal, regional, dan nasional. Dengan demikian, kawasan IKM hilirisasi kelapa tidak hanya berfungsi sebagai pusat produksi, tetapi juga sebagai simpul distribusi yang efisien dan kompetitif.

Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang hilirisasi produk kelapa. Lebih jauh, kawasan ini juga berperan sebagai pusat inovasi dan pengembangan usaha, dengan ruang inkubasi bisnis, pendampingan manajemen, serta fasilitas pelatihan yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pelaku industri. Sinergi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kawasan IKM bukan hanya menjadi tempat produksi, tetapi juga wadah lahirnya wirausaha baru dan produk hilirisasi yang berdaya saing di pasar nasional dan global. Agar kebijakan ini berjalan efektif, diperlukan dukungan regulasi insentif investasi, kemudahan perizinan, serta tata kelola kawasan yang profesional dan akuntabel.

b. Kebijakan insentif investasi mikro-hilirisasi yaitu berupa subsidi bunga kredit.

Kebijakan ini dirancang untuk mendorong lahirnya lebih banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian, sehingga nilai tambah komoditas dapat dinikmati di tingkat lokal. Subsidi bunga kredit diharapkan dapat mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM hilirisasi yang selama ini terkendala modal usaha.

Lebih jauh, kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mempercepat proses hilirisasi melalui dukungan keuangan yang konkret, sehingga sektor hilir tidak hanya tumbuh di kota-kota besar, tetapi juga berkembang di kawasan produksi di tingkat desa dan kecamatan. Insentif ini sebaiknya diintegrasikan dengan program pendampingan usaha, agar bantuan modal benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama lembaga keuangan, koperasi, dan BUMDes/Ma dapat berperan sebagai fasilitator untuk memastikan bahwa pelaku usaha hilirisasi yang memperoleh insentif adalah mereka yang memiliki rencana usaha jelas, prospek pasar, serta komitmen terhadap kualitas dan keberlanjutan usaha. Dengan pendekatan ini, insentif investasi tidak hanya menjadi stimulus ekonomi jangka pendek, tetapi juga fondasi bagi transformasi ekonomi lokal berbasis industri kelapa hilir yang tangguh.



Gambar 10. Kebijakan pengembangan hilirisasi kelapa di Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek

c. Kebijakan penguatan kelembagaan hilirisasi kelapa berbasis koperasi dan BUMDes/Ma.

Kebijakan penguatan kelembagaan hilirisasi kelapa berbasis koperasi dan BUMDes/Ma diarahkan untuk membangun fondasi ekonomi lokal yang lebih mandiri, inklusif, dan berkelanjutan. Kelembagaan ini berfungsi sebagai pengelola utama rantai nilai hilirisasi di tingkat desa atau kelompok masyarakat, mulai dari pengumpulan bahan baku, pengolahan produk, hingga pemasaran. Melalui model kelembagaan BUMDes/Ma atau koperasi, diharapkan terjadi konsolidasi usaha mikro sehingga mampu mencapai skala ekonomi yang lebih efisien dan meningkatkan posisi tawar petani maupun pelaku usaha kecil dalam rantai pasok. Kelembagaan ini juga berperan sebagai entitas bisnis profesional yang mengelola unit-unit produksi bersama.

Kebijakan ini tidak hanya berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi juga menekankan pada aspek penguatan tata kelola, transparansi keuangan, dan akuntabilitas usaha. Pendampingan manajemen, pelatihan tata kelola usaha, dan sistem audit rutin menjadi bagian penting untuk memastikan kelembagaan BUMDes/Ma atau koperasi dapat berjalan sehat, profesional, dan berorientasi pada keberlanjutan. Selain itu, kolaborasi kelembagaan ini dengan sektor swasta, perguruan tinggi, dan lembaga pendampingan usaha juga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas inovasi, akses teknologi, dan jangkauan pasar, termasuk ke *platform e-commerce* dan pasar ekspor. Dengan penguatan kelembagaan ini, diharapkan hilirisasi komoditas unggulan daerah tidak hanya menciptakan nilai tambah ekonomi, tetapi juga menjadi pilar utama pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi desa.

PERAN BRIDA DAN BRIN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, Brida melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian litbangjirap serta invensi dan inovasi di daerah. Dalam upaya pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah, Brida secara teknis dibina oleh BRIN. BRIN selaku lembaga pelaksana kegiatan riset dan inovasi berperan untuk memberikan advokasi atau pendampingan dalam penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah. Brida berperan sebagai hub bagi komponen ekosistem riset dan inovasi pada tingkat daerah dengan membangun jejaring riset dan inovasi pada tingkat provinsi, nasional, bahkan global. Sebagai

contoh dalam upaya penderasan hilirisasi dan melindungi kekayaan intelektual (KI) daerah, Brida perlu memperkuat sentra KI dengan meningkatkan kolaborasi bersama perguruan tinggi baik pada tingkat kabupaten maupun provinsi, lembaga riset, serta kementerian/lembaga pusat. Perlu dikaji pula mengenai efektifitas dan efisensi dalam membangun ekosistem KI pada satu kawasan lintas kabupaten.

Selain itu, BRIN sebagai lembaga pendanaan, untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi nasional memiliki skema pendanaan kolaboratif dan kompetitif

yang dapat diakses untuk pengembangan ekosistem riset dan inovasi mendukung hilirisasi produk unggulan di Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek (Tabel 8).

Skema pendanaan kompetitif tersebut dapat diakses melalui pendanaan-risnov.brin.go.id.

Tabel 8. Skema pendanaan riset yang dapat diakses di BRIN untuk pengembangan ekosistem riset dan inovasi mendukung hilirisasi produk unggulan di Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek

No.	Area	Kolaborator	Output	Skema tersedia
1	Hulu	Perguruan Tinggi, Badan Usaha, Lembaga Riset, Organisasi Masyarakat	KTI, KI	RIIM Kompetisi
2	Hulu	Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, Industri	Kelembagaan kolaborasi yang kuat	PKR (e.g. produk turunan kelapa)
3	Hilir	Pebisnis rintisan, Pemerintah Daerah	Kematangan manajemen bisnis dan kesiapan produk untuk dipasarkan	RIIM Start up Brida
4	Hilir	Industri, Lembaga Riset, Perguruan Tinggi	Produk bersertifikat	RIIM pengujian produk inovasi kesehatan/pertanian/teknologi

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pembangunan infrastruktur strategis seperti JLS di Jawa Timur memiliki potensi besar sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi kawasan, khususnya Kabupaten Pacitan dan Trenggalek. Namun, jika tidak diintegrasikan dengan pengembangan sektor produktif yang berorientasi pada hilirisasi dan penguatan ekonomi lokal, maka infrastruktur tersebut hanya akan menjadi jalur lintasan tanpa kontribusi signifikan terhadap transformasi ekonomi wilayah. Untuk itu, diperlukan kebijakan pengembangan yang bersifat inklusif, terintegrasi, dan berbasis potensi lokal antara lain,

1. Implementasi kebijakan hilirisasi berbasis riset dan inovasi dengan membangun kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset (termasuk BRIN), pelaku usaha, dan komunitas lokal dan manfaatkan skema pendanaan BRIN seperti RIIM Kompetisi, PKR, dan RIIM Start-up Brida untuk menginkubasi inovasi di sektor hilirisasi kelapa.
2. Penguatan SDM hulu–hilir melalui pengembangan program pelatihan terpadu untuk penyuluh dan pelaku

hilirisasi berbasis vokasi dan praktik langsung dari industri serta mendorong masuknya program praktisi mengajar pada SMK/Sekolah Tinggi dengan fokus pada pengolahan hasil, pengemasan, mutu, dan pemasaran digital.

3. Pengembangan kawasan industri kecil–menengah dengan memprioritaskan pembangunan kawasan IKM hilirisasi kelapa di dua kabupaten (dan kabupaten lainnya). Kawasan tersebut harus dirancang sebagai pusat produksi sekaligus tempat edukasi dan promosi produk olahan kelapa.
4. Pemberian insentif hilirisasi mikro dengan menyiapkan regulasi daerah untuk insentif: subsidi bunga KUR hilirisasi, serta memastikan insentif terintegrasi dengan pendampingan bisnis agar tepat sasaran dan berkelanjutan.
5. Penguatan kelembagaan koperasi/BUMDes/Ma sebagai pelaku hilirisasi secara profesional untuk mengelola unit-unit pengolahan bersama, serta menyediakan pelatihan rutin dan sistem audit kelembagaan agar transparan dan akuntabel.

REFERENSI

1. RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019–2024.
2. Rancangan akhir RPJMD 2025–2029 Provinsi Jawa Timur.
3. RPJPN 2025–2029 Lampiran I
4. BPS Jatim
5. BRIN. 2025. Indeks Daya Saing Daerah 2024.
6. Bappenas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2024. Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025–2045.
7. Rancangan akhir RPJMD 2025–2029 Kabupaten Pacitan.
8. Perda Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pengembangan Industri Kabupaten Pacitan.
9. KPPN Pacitan, Data Realisasi KUR.
10. Prasetyia, F., Pangestuty, F.W., Herlambang, A.P. 2022. Optimalisasi rantai pasok komoditas pertanian strategis di Jawa Timur. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 15(3): 257–270. DOI: 10.19184/jsep.v15i3.34368.

Foto sampul: <https://ar.inspiredpencil.com>

Lampiran II Surat Dinas
Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah
Nomor : B-328/II.9/RI.00.00/6/2025
Tanggal : 30 Juni 2025

KOP PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

Nomor : ... Juni 2025
Lampiran :
Hal : Tanggapan Naskah Kebijakan (*Policy Paper*)

Pada tanggal telah diterima Naskah Kebijakan (*Policy Paper*) yang berjudul **“Hilirisasi Komoditas Kelapa untuk Peningkatan PDRB Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek Sebagai Lokasi Prioritas Pemerataan Pembangunan di Jalur Lintas Selatan Jawa Timur”** dari Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

Naskah Kebijakan *Policy Paper*) ini dimanfaatkan sebagai bahan, dasar, dan/atau rujukan dalam penyusunan dan/atau penyempurnaan *(*centang pada pilihan - bisa lebih dari satu*):

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029;
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026;
- Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID);
- Perumusan/ Implementasi/ Revisi Peraturan (*bila ada disebutkan nama dan nomor peraturan*);
- Referensi/ Evaluasi/ Asesmen/ Advokasi Kebijakan terkait (*disebutkan kebijakannya*);
- Penyusunan kajian tematik berbasis bukti untuk solusi permasalahan daerah;
- ... (*lainnya -- mohon sebutkan*).

Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Bupati Kabupaten Pacitan,

.....

Lampiran III Surat Dinas
Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah
Nomor : B-328/II.9/RI.00.00/6/2025
Tanggal : 30 Juni 2025

KOP PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Nomor : ... Juni 2025
Lampiran :
Hal : Tanggapan Naskah Kebijakan (*Policy Paper*)

Pada tanggal telah diterima Naskah Kebijakan (*Policy Paper*) yang berjudul **“Hilirisasi Komoditas Kelapa untuk Peningkatan PDRB Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek Sebagai Lokasi Prioritas Pemerataan Pembangunan di Jalur Lintas Selatan Jawa Timur”** dari Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.

Naskah Kebijakan *Policy Paper*) ini dimanfaatkan sebagai bahan, dasar, dan/atau rujukan dalam penyusunan dan/atau penyempurnaan **(centang pada pilihan - bisa lebih dari satu):*

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029;
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026;
- Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID);
- Perumusan/ Implementasi/ Revisi Peraturan (*bila ada disebutkan nama dan nomor peraturan*);
- Referensi/ Evaluasi/ Asesmen/ Advokasi Kebijakan terkait (*disebutkan kebijakannya*);
- Penyusunan kajian tematik berbasis bukti untuk solusi permasalahan daerah;
- ... (*lainnya -- mohon sebutkan*).

Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Bupati Kabupaten Trenggalek,

.....